

SOAL “JALUR SESAT” YANG MENYESATKAN

Sofian Effendi¹

Forum Editorial Media Indonesia hari Kamis tanggal 26 Juni berjudul “Jalur Sesat di Jalur Khusus” betul-betul membuat para pencintanya prihatin dan kehilangan respek pada salah satu koran kebanggaan nasional. Entah bagaimana suasana kebatinan bung Daktur pada waktu menulis tajuk tersebut. Apa pun alasannya dan bagaimanapun suasana psikologisnya, yang jelas editorial tersebut telah menyesatkan opini publik tentang “jalur khusus” penerimaan mahasiswa yang dilakukan beberapa PT-BHMN. Secara sewenang-wenang bung Daktur telah mencap jalur khusus penerimaan mahasiswa sama dengan “jalur sesat”. Penamaan tersebut telah dilakukan secara a-priori, tanpa usaha pembuktian empiris, hanya dengan berandai-andai, yang dapat menyesatkan warga masyarakat yang memang sedang bingung. Sayang sekali, prasyarat ‘jurnalisme fakta’ belum terpenuhi dan ‘jurnalisme makna’ belum lagi tercapai.

Istilah jalan sesat adalah istilah yang banyak digunakan oleh penyebar agama tauhid. Umat dan calon umat selalu diajarkan bahwa agar masuk surga mereka harus selalu berada di jalan benar yaitu jalan tauhid. Kalau menyeleweng atau goyang ketauhidan seseorang, maka dia menyimpang menuju jalan sesat.

Apa jalan kebenaran pada bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang banyak mendapat sorotan masyarakat akhir-akhir ini? Menurut saya paling tidak ada dua. Pertama, pendidikan tinggi harus memberikan pendidikan bermutu tinggi, tidak saja dalam penguasaan iptek, tetapi juga dalam kualitas moral dan budi pekerti yang luhur. Kedua, pendidikan tinggi harus merupakan tiang penyangga keadilan dalam pelaksanaan salah satu hak asasi manusia yakni mendapatkan pendidikan bermutu.

Belajar dari kegagalan negara lain dalam reformasi pendidikan tinggi, Pemerintah Indonesia, melalui PP No. 61 tahun 1999, telah melakukan suatu terobosan manajemen yang cukup berani menurut penilaian saya. Terobosan manajemen tersebut adalah

¹ Penulis adalah Pengamat Pendidikan Tinggi dan tinggal di Yogyakarta.

dengan menyapih PTN yang selama ini memperoleh berbagai kemudahan, tetapi juga keterbatasan, sebagai instansi pemerintah, menjadi suatu “*independent administrative entity*” yang ditabalkan dengan nama Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN). Secara administrative badan itu adalah badan milik pemerintah yang bersifat nirlaba. Dia diberikan independensi atau kemandirian dalam mengelola urusan akademik, urusan keuangan dan urusan kepegawaiannya. Semua kebebasan ini diberikan agar PT-BHMN tidak terikat dengan berbagai kekakuan peraturan birokrasi pemerintah, khususnya dalam bidang keuangan dan kepegawaian

Selama hampir 60 tahun kinerja PTN telah terkendala oleh berbagai aturan ketat yang diterapkan pada instansi pemerintah. Akibatnya ternyata amat fatal. Lembaga pendidikan nasional tidak mampu melaksanakan misinya dengan baik dan tertinggal jauh dari pt di negara tetangga dalam penyediaan pendidikan tinggi bermutu dan dalam mencapai keadilan akses bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

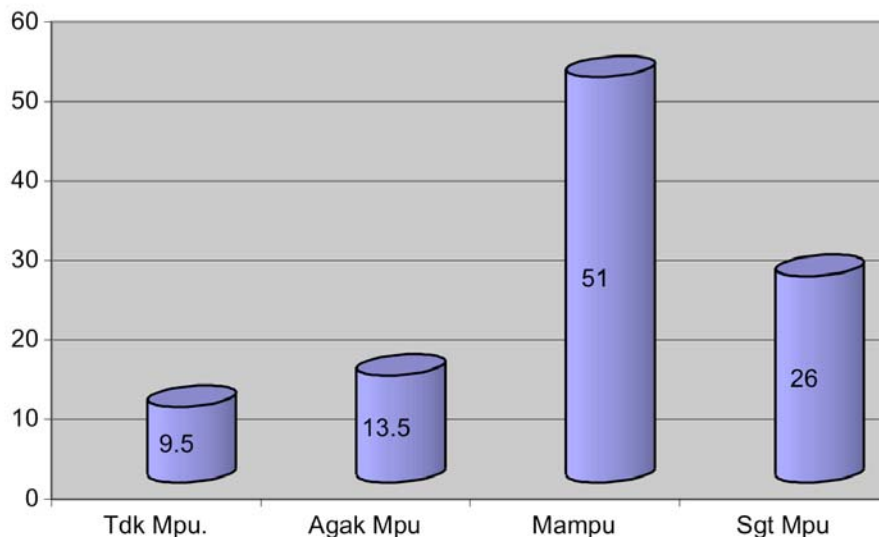
Bahwa PT Indonesia belum mampu menyediakan pendidikan tinggi bermutu telah ditunjukkan oleh Survei PT Asia Bermutu yang diselenggarakan oleh majalah *Asiaweek*. Pada tahun 2000, PT papan atas Indonesia seperti UI dan UGM, hanya mampu menduduki posisi 61 dan 68 dari 77 PT yang ikut disurvei. UNDIP dan UNAIR bahkan lebih rendah. UGM, misalnya, hanya menduduki ranking 43 dalam kualitas akademik, ranking 77 dalam kualitas dosen, ranking 69 dalam kualitas penelitian, ranking 73 dalam sumber keuangan, 76 dalam publikasi ilmiah, dan 71 dalam fasilitas teknologi informasi. Kemampuan untuk menyediakan akses pendidikan tinggi yang adil bagi golongan tidak mampu juga tidak menunjukkan bukti yang cukup signifikan.

Persepsi masyarakat, termasuk dugaan bung Daktur, bahwa pendidikan tinggi murah karena disubsidi besar-besaran oleh Pemerintah lebih mampu menciptakan pemerataan dan keadilan, seumur-umur tidak pernah tercapai. Saya sendiri sudah mengamati keadilan akses golongan berpenghasilan rendah pada pelayanan pendidikan, kesehatan dan *public utilities* sejak 1969 (Prisma, 1969). Dalam bidang pendidikan, hanya pada pendidikan dasar sudah terdapat tanda-tanda pemerataan. Namun, semakin tinggi jenjang pendidikan, subsidi pemerintah cenderung lebih dinikmati oleh golongan mampu.

Tren ini ternyata tidak berubah sampai sekarang. Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2002, menunjukkan bahwa pada tingkat nasional akses golongan berpendapatan rendah terhadap pendidikan tinggi hanya 3,2 persen, sedangkan golongan berpendapatan tinggi mencapai 30,6 persen. Di DIY akses golongan pertama hampir dua kali lipat, 6,9 persen. Tetapi, akses golongan berpenghasilan tinggi juga meningkat lebih dua kali lipat, menjadi 76,7 persen. Dengan kata lain, pada tingkat nasional kesenjangan akses pendidikan tinggi cukup lebar, Jumlah anak-anak dari golongan berpenghasilan tinggi yang menikmati pendidikan tinggi bersubsidi hampir sepuluh kali lipat dari anak-anak golongan berpenghasilan rendah. Di DIY, keadilan akses menjadi bertambah rendah karena jumlah anak-anak dari golongan berpenghasilan tinggi yang menikmati subsidi pendidikan tinggi mencapai hampir 13 kali jumlah anak-anak golongan berpenghasilan rendah.

Sebaliknya, melalui UM-UGM, yang sama sekali bukan “jalur khusus” seperti persepsi masyarakat dan sebagian media, jelas telah tercipta keadilan akses di UGM.

AKSES PENDIDIKAN TINGGI, UGM 2003



Akses golongan tidak mampu mencapai 9,5 persen dan akses golongan mampu hanya mencapai 26,1 persen. Dengan kata lain, kesenjangan di UGM turun drastic menjadi hanya 2,7 kali. Menurut pendapat kami ini adalah suatu peningkatan akses dan keadilan yang amat signifikan, dan sangat sesuai dengan semangat kerakyatan UGM.

Kalau kita baca dengan teliti kalimat-kalimat yang ditulis dalam Editorial, banyak sekali yang bersifat insinuatif dan menggiring pembaca yang kurang arif menuju jalan sesat. Misalnya, "... mereka yang mampu membayar berhak memperoleh bangku di perguruan tinggi tanpa peduli apakah si calon mahasiswa memenuhi standar mutu yang disyaratkan" Apakah penulis sekedar menduga-duga atau memang ada bukti konkret berapa persen calon yang diterima karena membayar dan bukan karena nilai kelulusan. Selanjutnya penulis editorial menyimpulkan "Karena itu, dengan alasan apapun, perguruan tinggi tidak bisa menggadaikan standar mutu dengan kekurangan biaya." Kesimpulan ini jelas sekali dilandasi oleh semangat "low trust" yang amat kental. Mau tidak mau kita akan teringat pada hipotesis Francis Fukuyama seperti yang ditulisnya dalam buku berjudul "Trust". Bangsa Indonesia, kata Fukuyama, adalah bangsa yang rendah kepercayaan kepada sesamanya. Karena itu bangsa Indonesia sukar maju.

Di bagian lain, penulis editorial menyatakan "Andaikata perguruan tinggi menaikkan gaji dosennya sepuluh kali lipat dari tingkat sekarang, apakah diperlukan anggaran ratusan miliar? Tentu tidak. Bung Daktur, apakah anda sudah mencoba mengecek berapa anggaran belanja pegawai di PT-BHMN besar seperti UGM yang memiliki 2500 dosen dan 2600 pegawai? Setiap tahun anggaran untuk gaji mencapai Rp. 130 miliar. Kalau mau dinaikkan 10 kali seperti anjuran penulis, anggaran untuk gaji mencapai Rp. 1,3 trilyun per tahun. Padahal untuk meningkatkan mutu bukan gaji saja yang harus diperbaiki, tetapi juga sarana dan prasarana penelitian, perpustakaan, sampai fasilitas informasi dan komunikasi.

Sementara sumbangan dari orang tua mampu tidak lebih dari Rp. 20 miliar. Dana tersebut hanya cukup untuk menyubsidi anak-anak golongan tidak mampu, meremajakan beberapa peralatan, penyediaan beasiswa untuk peningkatan SDM dosen dan pegawai dan penyediaan akses ke Jaringan Internet Global dari 0,01 Kbps mahasiswa menjadi 0,2 Kbps per mahasiswa. Untuk 50.000 mahasiswa UGM perlu dikeluarkan dana sebesar Rp. 5-6 miliar per tahun agar para mahasiswa tidak gagap teknologi informasi. Mungkin, kalau anda agak mau sedikit bersusah payah mencari data, pasti "pesan" di Editorial tidak segegabah seperti tulisan anda.

Kalau kita simak berita di MI dalam beberapa minggu terakhir nampaknya ada ada pemilahan paradigma dalam keluarga MI/MetroTV yang amat besar itu. Kalau mau disederhanakan ada penganut paradigma populis yang menghasilkan tulisan penuh sak wasangka seperti disuarakan melalui Forum Editorial hari Kamis, 26 Juni, yang dapat menyesatkan publik. Dan, ada penganut paradigma keadilan dan kemajuan seperti yang disuarakan dalam reportase-reportase yang faktual dan tajam tetapi tidak menyesatkan (MI, 23/6/2003).

Saya sih hanya berharap MI selalu mampu mengamalkan jurnalisme fakta dan jurnalisme makna untuk mencerdaskan warga bangsa, bukan jurnalisme yang diimbui dengan praduga yang menyesatkan.

Yogyakarta, 27 Juni 2003